



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. JUNAEDI, SH., MM.**

Jabatan : **BUPATI PEMALANG**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 21 Januari 2019

Pihak Kedua, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
BUPATI PEMALANG Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pihak Pertama,

dto

dto

H. JUNAEDI, SH., MM.

Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	Persen	81,57
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Angka	85,21
		Persentase perempuan dilembaga pemerintah	Persen	30
3	Meningkatnya penanganan pemberian jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	19,66
4	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang meningkat kapasitasnya	Persen	56
		Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	40
		Persentase anak terlantar yang terbina	Persen	45
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur	Persentase penyediaan administrasi perkantoran dan pelaporan	Persen	100
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100

		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80
		Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	80
		Persentase peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Persen	80
		Persentase peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Persen	80
6	Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan melalui pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	Persen	19,66
		Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	Persen	19,66
		Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	45
		Persentase penyandang cacat dan trauma yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	50
7	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBPP	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Dinsos KBPP yang terpenuhi	Persen	100
		Nilai AKIP Dinsos KBPP	Nilai	61
8	Meningkatnya sarana program ganti sosial yang	Persentase Bantu Sosial skala Kabupaten / Kota	Persen	100

	mendapat bantuan	yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		
9	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Persen	37,83
		Rasio KDRT	Angka	0,006
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	Persen	100
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	Persen	100
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	Persen	100
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih	Persen	100

		bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		
		Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	70,25
10	Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	Persen	44,22

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.076.262.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	773.510.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.275.000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	301.065.000
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	123.362.500
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	1.247.630.000

	Kesejahtera	
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	598.300.000
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	96.000.000
9	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	125.000.000
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial I	30.000.000
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	225.445.000
12	Program pembinaan anak terlantar	135.150.000
13	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	267.335.000
14	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	538.590.500
15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	344.074.500

16	Program Keluarga Berencana	7.149.893.250
17	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	285.140.000
18	Program pelayanan kontrasepsi	153.290.000
19	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	367.451.000
20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	40.000.000
21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	82.500.000
22	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	184.938.750
Total Anggaran		14.267.213.000

Pemalang, 21 Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

dto

H. JUNAEDI, SH., MM.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dto

Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.